KPK SUPERVISI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Tahun Depan PAD Kota Yogya Ditarget Tembus Rp 1 Triliun

YOGYA (KR) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogya pada tahun depan ditargetkan mampu menembus angka Rp 1 triliun. Hal itu berkaitan dengan upaya optimalisasi potensi dan proyeksi pendapatan daerah yang bakal dilakukan. Apalagi Kota Yogya juga mendapatkan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama ini PAD Kota Yogya belum pernah mampu menembus angka Rp 1 triliun. Sehingga jika target pada tahun 2025 mampu terpenuhi maka akan menjadi capaian positif bagi jajaran aparatur Pemkot Yogya. "Kami akan pertajam lagi pada tahun 2025 sehingga pendapatan daerah kami targetkan satu triliun rupiah," tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, Jumat (17/5).

Pada tahun ini pendapatan asli daerah di Kota Yogya ditargetkan Rp 800 miliar, terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan target hingga Rp 200 miliar pada tahun depan tentu akan menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi aparatur. Terutama di sejumlah instansi yang mengampu pajak daerah dan retribusi daerah. Terlebih, sejumlah retribusi yang tahun lalu dipungut namun mulai tahun ini dibebaskan seiring pemberlakuan undang-undang perihal keuangan pemerintah daerah. Di antaranya seperti retribusi uji kendaraan, retribusi tera ulang dan lainnya.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengungkapkan berkaitan optimalisasi pendapatan daerah jajarannya sudah berkoordinasi dengan tim KPK yang melakukan supervisi. Pihaknya juga telah berkomitmen melakukan optimalisasi pajak dengan meningkatkan target pendapatan daerah setiap tahun. "Pada tahun 2023 Pemkot mendapatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 81,3 dan baru diumumkan oleh KPK kemarin. Nilai itu merupakan yang tertinggi di DIY. Selain menjadi komitmen kami dalam pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian dan konsen untuk meningkatkan pendapatan daerah," urainya.

Menurutnya dari koordinasi dengan KPK, Pemkot Yogya banyak mendapatkan masukan dan arahan terkait optimalisasi pendapatan daerah. Hal yang menjadi perhatian terkait masukan KPK ialah melakukan kajian proyeksi pendapatan daerah sebagai pedoman dan evaluasi meningkatkan target pendapatan daerah. "Kajian potensi (proyeksi) pendapatan perlu dilakukan segera supaya bisa mengetahui sebetulnya potensi pendapatan kita berapa. Jadi untuk menentukan target (pendapatan) itu lebih enak," imbuhnya.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi secara bersama-sama. Di sampinng itu pihaknya juga akan menyampaikan terkait optimalisasi pendapatan daerah. Terutama pentingnya membuat kajian proyeksi sektor pendapatan sebagai pedoman evaluasi untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk melakukan hal tersebut Pemkot Yogya bisa melibatkan praktisi untuk membuat kajian proyeksi pendapatan secara berkala minimal dua tahun sekali. Termasuk membenahi sistem administrasi pajak daerah. "Kami juga mengingatkan untuk melakukan evaluasi terhadap badan usaha milik daerah dan badan layanan usaha daerah untuk optimalisasi pendapatan," katanya. **(Dhi)-f**

DAMPINGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

'Koper Kota', Inovasi Program Pemberdayaan Perempuan

YOGYA (KR) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya menggulirkan inovasi berupa Sekolah Perempuan Kota Yogya (Koper Kota). Inovasi tersebut sekaligus memperkuat program pemberdayaan terutama menyasar kaum perempuan.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan DP3AP2KB Kota Yogya Ria Rinawati, menjelaskan Koper Kota sengaja dibangun mengingat jumlah kasus kekerasan perempuan di Kota Yogya yang relatif banyak. "Kami berpikir para perempuan korban kekerasan tersebut ke depannya akan dibagaimanakan, dan dari situlah ide Koper Kota muncul. Bentuk pemberdayaannya seperti pelatihan keterampilan dan sebagainya. Termasuk terkait literasi digital dan keuangan digital yang akan menjadi materi dalam sekolah perempuan," ujarnya, Jumat (17/5).

Kegiatan perdana Koper Kota rencananya akan dilaksanakan bulan ini juga. Jumlah siswa atau peserta yang sudah terdaftar mencapai 30 kaum perempuan. Setelah program perdana nantinya bergulir maka akan dikembangkan lagi jika dalam pengaplikasiannya berjalan dengan lancar. Pengembangannya terutama dari aspek peserta yang tidak hanya perempuan korban kekerasan, tetapi bisa juga diikuti oleh kelompok rentan lain. "Misalnya pernikahan usia anak yang sedang marak. Itu kan perlu ada pendampingan dan pembekalan sendiri sehingga bisa melalui Koper Kota. Nanti akan bertahap," imbuhnya.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengapresiasi inovasi yang digagas DP3AP2KB tersebut. Menurutnya, sekolah perempuan tentunya akan memberikan edukasi, motivasi sekaligus membekali keterampilan bagi perempuan. Terutama kaum perempuan yang selama ini rentan menjadi korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun sektor publik. Sekolah tersebut akan direalisasikan pada bulan ini dengan fase percobaan atau kelas perdana. Dalam penyelenggaraannya, Pemkot Yogya akan melibatkan seluruh entitas terkait baik dari kalangan akademisi maupun praktisi untuk memberikan edukasi sesuai dengan konpetensi masing-masing. "Sekolah bukan berarti ada gedung atau kepala sekolah, tapi minimal ini adalah wadah di mana terjadi pertemuan antara peserta atau siswa dan guru atau narasumber," ungkapnya.

Selain koper sebagai sebuah akronim dari Koper Kota, hal itu juga dapat dimaknai sebagai wadah yang tertutup. Jika koper tersebut terbuka maka akan membuat berceceran isi di dalamnya. Sehingga koper diibaratkan sebagai sekolah perempuan dan isiannya ialah para peserta yang meliputi perempuan korban kekerasan. Koper Kota bersifat tertutup yang artinya Pemkot berkomitmen untuk melindungi privasi dari para siswa atau peserta. Hal ini agar para peserta tidak merasa dikucilkan saat bersosialisasi di masyarakat. "Kalau kita biarkan berceceran ya akan kemana-mana, makanya perlu diwadahi pada sebuah koper yang wujudnya adalah sekolah perempuan yang mendorong pada hal hal positif," jelasnya. **(Dhi)-f**

Yogyakarta Ajang Puncak Peringatan HBDI

KR-Abrar

Moh Adib Khumaidi menyerahkan kenang-kenangan kepada Komisaris Utama PT BP KR.

YOGYA (KR) - Sejak ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) pada tahun 2008 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selalu mengadakan peringatan HBDI di seluruh IDI cabang dan wilayah. Kegiatan itu bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para dokter yang sudah menggerakkan kebangkitan nasional. Selain itu juga untuk penanaman nilai pengabdian agar sosok seorang dokter dapat berperan di lingkungannya.

Tahun 2024, puncak peringatan HBDI ke-116 digelar di DIYm mulai Jumat - Senin (17-20/5). Hal tersebut disampaikan DR Dr Moh Adib Khumaidi SpOT, Ketua umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) saat bersilaturahmi dengan jajaran Direksi PT BP *Kedaulatan Rakyat* (KR) dan Pemred KR, di Jalan Margo Utomo, Yogya, Jumat (17/5). Kedatangan PB IDI diterima Imam Satriadi SH (Direktur Keuangan), Prof Dr Inajati Adrisijanti (Komisari Utama) dan Drs H Octo Lampito MPd (Pemred KR). Sedangkan Dr Moh Adib Khumaidi didampingi dr Joko M (Ketua IDI Wilayah DIY).

Pelaksanaan HBDI tahun 2024 mengusung tema, 'Sinergi dan Kolaborasi Untuk Negeri'.

Dijelaskan Moh Adib Khumaidi, setiap mengadakan kegiatan di daerah, PB IDI selalu menggandeng tokoh-tokoh yang ada di daerah dan media, termasuk KR. "Kami selalu berkolaborasi dengan media yang merupakan suatu keharusan dan penting untuk membranding profesi dokter," tuturnya.

Rangkaian kegiatan HBDI ke-116 ini diisi dengan beragam bakti sosial untuk pembangunan kesehatan masyarakat sekitar wilayah DIY. Di antara program kerja HBDI ke-116 di Yogya adalah bakti sosial (Baksos) di dua RSUD di DIY, mencegah stunting di desa binaan yang ada di Sleman, Kulonprogo, Bantul, Kota Yogya dan Gunungkidul. Selain itu, juga ada pemeriksaan kesehatan dan minum jamu bersama. Juga peresmian sumur pompa air bersih di Ponjong Gunungkidul, ziarah ke Makam Dr Wahidin di Jalan Magelang dan kegiatan lain. **(Rar)-f**

Tak Boleh Abai, Kusta Masih Mengintai

KR-Istimewa

Para narasumber menyampaikan paparan.

YOGYA (KR) - Tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan beban kasus kusta tertinggi di dunia. Penyakit yang relatif jarang terdengar bagi sebagian masyarakat ini termasuk dalam penyakit tropis yang terabaikan (neglected tropical diseases/NTD). Untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit ini, Pusat Kedokteran Tropis (PKT) UGM bekerja sama dengan NLR Indonesia mengangkat tema penyakit ini pada talkshow Tropmed Talk on Stage, Rabu (15/5) bertajuk 'Apa Kabar Kusta Pasca Pandemi?'.

Ketua Tim Kerja NTDs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Regina T Sidjabat MEpid menuturkan, kusta adalah penyakit infeksi dan menular yang disebabkan oleh kuman mycobacterium leprae. Kuman ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita (kontak yang lama dan berulang) dan melalui pernapasan dengan masa inkubasi 2-5 tahun setelah kuman masuk ke dalam tubuh.

Hal yang paling ditakuti dari kusta adalah terjadinya disabilitas. Padahal kusta dapat diobati total tanpa meninggalkan disabilitas selagi ditemukan sejak dini dan segera diobati hingga tuntas. "Karena itu, upaya menemukan penderita kusta sebelum mengalami disabilitas menjadi langkah yang sangat penting," kata Regina.

Sementara itu, Analis Kebijakan, Pusat dan Sistem Strategi Kesehatan Kemenkes RI, Hana Krismawati MSc mengatakan, dunia penelitian juga memegang peranan penting untuk menemukan strategi penanganan kusta. Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk melakukan penelitian tentang kusta, salah satunya adalah perihal pembiayaan.

Talkshow ini sekaligus menjadi pre-event konferensi internasional yang akan diadakan PKT UGM Oktober yang akan datang, 2nd GAMA ICTM 2024. Penyelenggara menghadirkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penanganan kusta. Selain pemangku kepentingan, hadir pula peneliti, praktisi dari non-government organization (NGO) hingga orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK).

Melalui talkshow ini, penyelenggara berharap meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kusta itu masih ada. NLR Indonesia sudah memulai upayanya dalam penanggulangan kusta dan konsekuensinya sejak 1975. Pendekatan yang digunakan ada tiga, yaitu: zero transmission (nihil penularan), zero disability (nihil disabilitas) dan zero exclusion (nihil eksklusi).
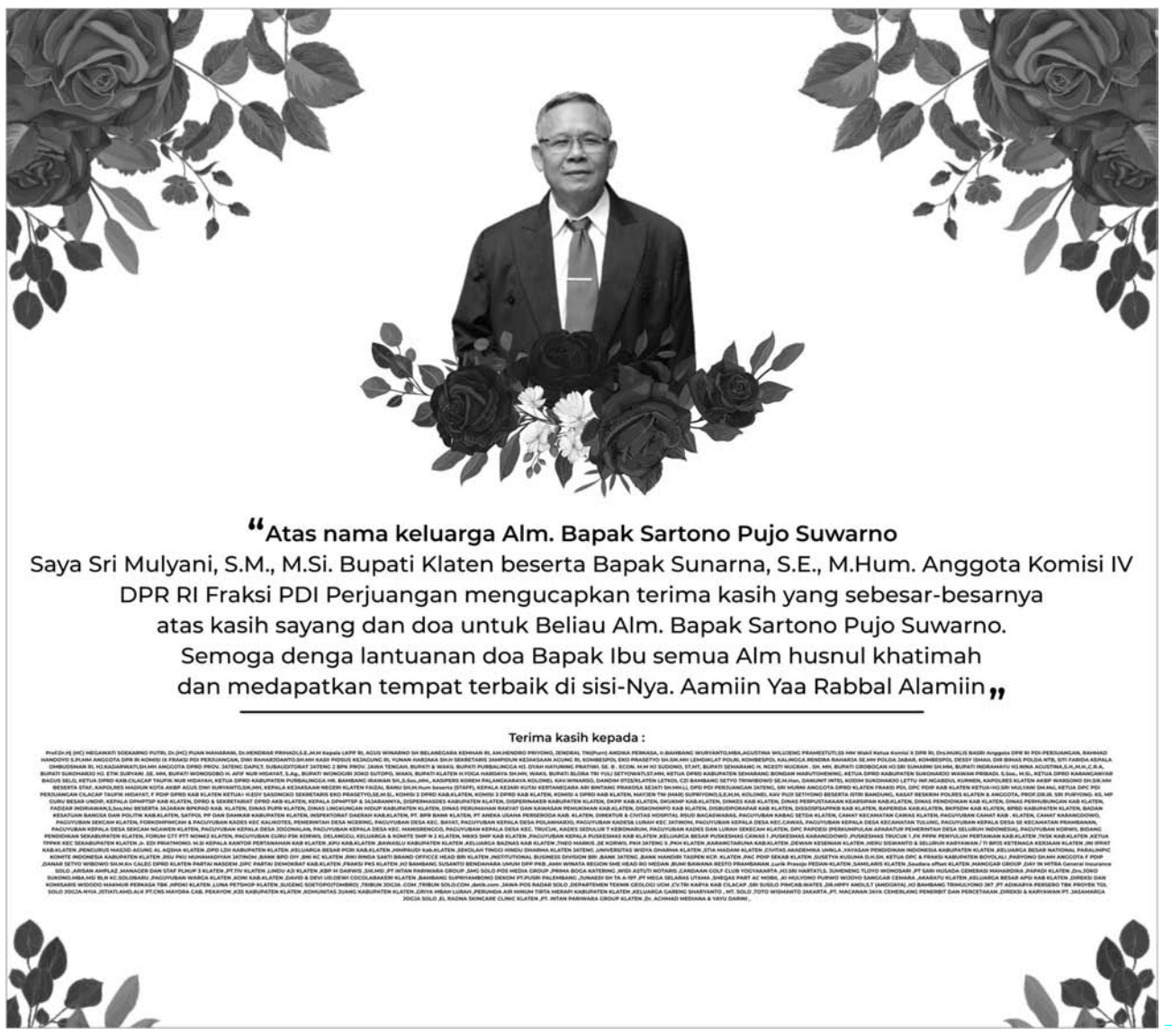
Isu penyakit yang digolongkan sebagai NTDs juga mendapat perhatian dari PKT UGM. Satu dari enam kelompok kerja (pokja) yang ada di PKT UGM adalah pokja NTDs. Tahun lalu, PKT UGM terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kusta 2023-2027. **(Dev)-f**